

## KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

### CAPACITY OF VILLAGE APPARATUS IN IMPLEMENTING VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

Sri Untari\*, M. Mujtaba Habibi, Abd Mu'id Aris Shofa, Lia Nurul Fauziah, Aliyah Ardhana  
Riswari

<sup>1</sup>Corresponding author, Surel: [sri.untari.fis@um.ac.id](mailto:sri.untari.fis@um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65141, Indonesia

Diterima: 31-08-2022, dipublikasikan 30-10-2022

#### Abstract

The purpose of this study is to analyze the capacity of village apparatus in the management of village government administration in a case study in Boro Village, Selorejo District, Blitar Regency. This research approach is qualitative with the type of case study research. The data sources are obtained from informants, events, and documents. Data were collected by interview, observation, and documentation techniques. Data analysis was carried out with a case study recommended by Yin with pattern matchmaking. The results of the study show that the capacity of village officials in implementing village administration as seen from: (1) conceptual mastery is not optimal. This is due to the education level of the apparatus which is still low on average high school; minimal training experience, (2) technical skills are not optimal, caused by limited facilities, no wifi, not yet mastered applications, and lack of skills in using information technology in managing village government administration, (3) social skills are good, this becomes social capital valuable in village governance.

**Keywords:** capacity of village apparatus; administration; village government

#### Abstrak

Tujuan kajian ini untuk menganalisis kapasitas aparatur desa dalam manajemen administrasi pemerintahan desa studi kasus di Desa Boro, Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumen. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan studi kasus yang direkomendasi Yin dengan penjadodohan pola. Hasil kajian menunjukkan hasil yaitu kapasitas aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang dilihat dari: (1) penguasaan konseptual belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan aparat yang masih rendah rata2 SMA; pengalaman pelatihan yang minim, (2) keterampilan teknis belum optimal, yang disebabkan oleh terbatasnya sarana, belum ada wifi, belum dikuasainya aplikasi dan kurangnya keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, (3) kecakapan sosial sudah bagus, ini menjadi modal sosial yang berharga dalam pemerintahan desa.

**Kata kunci:** kapasitas perangkat; penyelenggaraan administrasi; pemerintahan desa

#### PENDAHULUAN

Pemerintahan secara umum berfungsi menjaga suatu sistem ketertiban umum, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Tugas pokok pemerintahan desa

prinsipnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah ada dalam rangka pelayanan publik, bukan untuk melayani diri sendiri dengan menciptakan suasana yang dapat membuat semua warga masyarakat mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama (Untari & Suharto, 2020). Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat (Habibi, Sukriono, Rapita, & Sudirman, 2019).

Kenyataan di lapangan banyak institusi pemerintah yang belum secara optimal melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, terlebih dalam pelayanan publik yang diukur dalam pengelolaan administrasi pemerintahannya. Masyarakat masih mengeluh dan menyatakan ketidakpuasannya terhadap kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Kecakapan kerja yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki aparatur desa menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, sehingga berdampak dalam pemberian pelayanan.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang kurang optimal mempengaruhi dalam pelayanan publik yang kurang baik pula. Kondisi ini akan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat. Kurang puasnya masyarakat atas kualitas pelayanan publik, disebabkan faktor berikut: 1) tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik semakin luas cakupannya dan semakin banyak jenisnya seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, sementara pemerintahan belum cukup memiliki kemampuan untuk menyediakan semuanya. 2) Kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyediakan semua tuntutan masyarakat yang semakin meningkat tidak seimbang. 3) Kualitas pendidikan masyarakat yang semakin baik berakibat pada semakin meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik (Imbaruddin, 2007). Secara teoritik pelayanan publik akan baik, jika pengelolaan administrasinya juga baik.

Tuntutan penyelenggaraan administrasi dalam pelayanan yang berkualitas makin gencar, karena pelayanan yang buruk berakibat pemborosan waktu, uang, dan sumber daya yang lainnya. Selain itu juga meningkatkan risiko-risiko terjadinya berbagai masalah yang berantai dan berkelanjutan. Demikian pula dalam pelayanan pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Pelayanan yang berkualitas dapat diwujudkan apabila aparat penyelenggara administrasi pemerintahan benar-benar profesional, mampu melaksanakan tugas, dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya. Terkait dengan hal tersebut, maka institusi pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan di tingkat desa senantiasa perlu memiliki suatu pengetahuan, kapabilitas, keterampilan akan pekerjaannya dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa.

Aparat desa sebagai pengelola administrasi pemerintahan desa seyogyanya memiliki kemampuan guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di desa. Kemampuan yang dimaksud adalah kompetensi seseorang dalam memanfaatkan atau menggunakan keterampilan serta ilmu pengetahuan yang ada untuk dipergunakan di dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (Hanno, Patton, & Marlow, 2000). Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan Robbins, Judge, Angelica, & Resthi (2008). Terdapat dua faktor kapasitas yaitu: (1) kapasitas intelektual yaitu kecakapan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar, dan memecahkan masalah; (2) kapasitas fisik, yaitu kecakapan menjalankan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa (Robbins *et al.*, 2008). Permasalahan bahwa aparat desa belum mampu mengelola administrasi pemerintahan desa dengan baik, yang diukur dari pengetahuan, keterampilan teknis,

dan keterampilan sosial. Kajian ini dilaksanakan untuk menganalisis kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa menyangkut pengetahuan dasar aparat desa akan administrasi pemerintahan desa buku administrasi apa saja yang harus ada.

## **METODE**

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipergunakan dengan tujuan utamanya adalah melukiskan keadaan sesuatu secara apa adanya situasi lapangan yang bersifat natural, wajar tanpa manipulasi (*natural setting*), (Bogdan & Biklen, 1984; Denzin, 2008; Neuman, 2017). Fokus penelitian pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Lokus ada di Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dengan jenis penelitian studi kasus tunggal. Studi kasus merupakan suatu penelitian terhadap suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif terhadap individu atau kelompok yakni untuk menggambarkan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa (Faisal, 1989; Natsir, 2005; Yin, 2012).

Penelitian ini sumber datanya dari: (a) informan, yaitu orang yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan adalah sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan diperoleh lewat wawancara mendalam. Informan dipilih secara *purposive sampling* dimana informan yang ditentukan karena dianggap paling mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penelitian (Fahira, Umar, & Habibi, 2022). Dalam penelitian ini ada dua informan yaitu informan internal, adalah pihak pemberi layanan atau aparat pemerintah desa Boro, Selorejo, Kabupaten Blitar dan informan eksternal yakni masyarakat yang membutuhkan pelayanan. (b) Peristiwa, merupakan data pendukung berupa peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. (c) Dokumen Sumber data yang berupa dokumen ini dapat berupa bulletin dan banner berisi visi misi desa Boro.

Teknik pengumpulan data menurut Yin (2012): (a) Teknik wawancara, menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan yakni aparat desa bagian pelayanan masyarakat (*yanmas*). (2) Observasi, dengan Teknik studi lapangan yakni proses pelayanan apar desa kepada masyarakat. (c) Dokumentasi dengan teknik mengumpulkan data sekunder berupa profil desa, buku administrasi desa, aplikasi yang digunakan.

Teknik analisis data menggunakan Teknik yang direkomendasikan Strauss dan Corbin (1998). Tahapannya yaitu *open coding*, dengan *breaking down*, *examining*, *comparing*, *conceptualizing*, dan *categorizing data*. Tahap *axial coding* meliputi kondisi penyebab, fenomena, konteks, kondisi intervening strategi interaksi atau tindakan, dan konsekuensi. Tahap coding melalui perbandingan hubungan antar kategori, memeriksa hubungan kategori, dan mengambil kesimpulan.

Teknik pengabsahan data digunakan: (a) Derajat kepercayaan (kredibilitas) dilaksanakan dengan triangulasi sumber dan teknik, ketekunan pengamatan, diskusi sejawat, dan referensi yang cukup. (b) Derajat keteralihan (transferabilitas), dengan menyusun laporan secara deskriptif yang jelas, rinci, logis, dan rasional tentang konteks.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis kajian tentang kapasitas perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ditinjau dari: (1) kapasitas konseptual memahami kebijakan tentang administrasi pemerintahan desa dan memahami aplikasi administrasi pemerintahan desa, (2) kapasitas teknis meliputi penguasaan penggunaan perangkat komputer, penguasaan platform administrasi pemerintahan desa, dan (3) kompetensi sosial meliputi kemampuan bekerjasama, kemampuan berempati.

## Kapasitas Konseptual

Kemampuan konseptual (*Conceptual Capacity*) yaitu kemampuan dalam mengetahui kebijakan dan aplikasi untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mental berpikir aparat Desa Boro kurang optimal. Data pendidikan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa**

No	Nama	Tugas	Tingkat pendidikan
1	EP	Kepala desa	SLTA
2	ES	Sekretaris Desa	S1
3	M	Perangkat	SLTA
4	NEE	Perangkat	SLTA
5	MRi	Perangkat	SLTA
6	BS	Perangkat	SLTA
7	IYH	Perangkat	S1
8	SNA	Perangkat	S1
9	Hry	Perangkat	SLTA
10	AVA	Perangkat	S1
11	YHS	Perangkat	SLTA
12	YAP	Perangkat	S1
13	RS	Perangkat	SLTA
14	Win	Perangkat	S1
15	WS	Perangkat	SLTA

Berdasarkan data di atas menunjukkan perangkat Desa Boro enam (6) orang (40%) sedangkan sembilan 9 orang (60%) berpendidikan SLTA. Kondisi Pendidikan aparat yang mayoritas SLTA tentu berpengaruh atas kemampuan konseptualnya. Hal ini sesuai hasil kajian Hendrawardani (2020) dan Mattoasi, Sapeni, dan Musue (2020) bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan dengan kompetensi aparat desa baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Pengetahuan aparat desa diukur berdasarkan hasil tes, yang dilaksanakan oleh peneliti dengan sepuluh pertanyaan yang diberikan. Hasil tes disajikan pada Tabel 2.

**Tabel. Hasil Pengetahuan Administrasi Pemerintahan Desa**

No	Nama	Tugas	Nilai
1	EP	Kepala desa	70
2	ES	Sekretaris Desa	70
3	M	Perangkat	50
4	NEE	Perangkat	62
5	MRi	Perangkat	46
6	BS	Perangkat	56
7	IYH	Perangkat	56
8	SNA	Perangkat	46
9	Hry	Perangkat	46
10	AVA	Perangkat	56
11	YHS	Perangkat	66
12	YAP	Perangkat	40
13	RS	Perangkat	36
14	Win	Perangkat	40
15	WS	Perangkat	42
Rata-rata			51,2

Berdasarkan table di atas menunjukkan kemampuan konseptual perangkat desa, masih belum cukup memadai, rata-rata masih 51,2. Hal ini sesuai kriteria penilaian menurut Akbar (2013) yang menjelaskan jika nilai rata-rata 51,2, berarti nilai tersebut dalam penggolongan nilai dengan kriteria "kurang baik". Hasil kajian Tul (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan aparat desa yang rendah menjadikan kemampuan menalarnya rendah, akibatnya mereka bekerja hanya sesuai dengan perintah atasan, kurang ada inisiatif, dan inovasi.

Dari kurangnya inisiatif perangkat dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menimbulkan kesan perangkat pemerintahan desa kurang pekerjaan. Untuk menghindari hal-hal negatif mengenai pelayanan publik oleh aparat desa diperlukan sebuah inovasi dan motivasi untuk melakukan pelayanan melebihi keperluan yang dibutuhkan masyarakat atau melebihi tuntutan pekerjaan dengan melaksanakan pelayanan tanpa menunggu instruksi lebih dahulu (Spencer & Spencer, 2008).

Penguasaan konsep tentang administrasi pemerintahan desa yang rendah, juga berdampak kapasitas memecahkan masalah juga masih rendah. Jumlah perangkat di kantor desa Blitar adalah 15 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan empat orang, dan kepala dusun empat orang, dan staf lima orang. Kebanyakan dengan jenjang pendidikan tertinggi SLTA. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kecenderungan perangkat pemerintahan desa yang bekerja hanya sesuai dengan instruksi dan hanya melaksanakan tugas rutin, namun untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memecahkan masalah belum nampak, masih harus menunggu kepala desa atau sekretaris desa. Kapasitas konseptual terkait dengan model buku administrasi desa, penatausahaan, kemampuan membuat konsep surat yang membutuhkan waktu yang cukup lama, ternyata juga dipengaruhi jenjang pendidikan aparat desa, untuk itu perlu pendidikan dan latihan (Dilapanga & Zingal, 2018).

### **Kapasitas Teknis**

Kapasitas teknis (*Technical Capacity*), yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perangkat pemerintahan desa Boro di kabupaten Blitar mempunyai stamina yang baik, hal ini dapat dilihat melalui kondisi fisik masing-masing dalam penyelesaian tugas baik dalam pengelolaan administrasi dalam lingkungan kantor maupun tugas lainnya di luar lingkungan kantor. Seperti yang dikemukakan oleh Robbins *et al.* (2008) bahwa stamina merupakan kapasitas untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu cukup lama. Stamina yang baik dapat menunjang penyelesaian pekerjaan secara efisien.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa tugas dan fungsi aparat pemerintahan desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian tentang aspek keterampilan aparat pemerintahan Desa Boro Kabupaten Blitar sudah baik. Manajemen administrasi pemerintahan di Desa Boro Kabupaten Blitar yang meliputi urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi sudah menggunakan computer. Begitu pula dengan pencatatan urusan keuangan seperti administrasi pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Ketersediaan lima buah laptop beserta jaringan internet di kantor desa yang dioperasikan oleh kepala desa, sekretaris desa serta kepala urusan telah digunakan untuk pengelolaan administrasi desa sesuai tupoksi masing-masing. Website informasi desa juga menunjukkan bahwa perangkat pemerintahan Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar memiliki keterampilan yang memadai. Namun keterampilan administratif aparat desa dalam penyelenggaraan administrasi desa tersebut masih perlu dikembangkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo (2007) bahwa pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi memiliki pengaruh positif bagi pengembangan budaya organisasi dan kompetensi individual. Pengembangan keterampilan khususnya dalam lingkup administrasi desa diperlukan guna mendukung peran pemerintah desa (Fahira *et al.*, 2022).

Selanjutnya hasil kajian juga menunjukkan bahwa keterampilan aparat desa dalam menggunakan teknologi informasi di Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar belum

menyeluruh, hanya dimiliki oleh sebagian perangkat, yakni kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan. Sedangkan perangkat kepala dusun memiliki keterampilan yang masih rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya kemauan mereka dalam melatih keterampilannya. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu Kepala Dusun Bapak Sn yang menyatakan:

“la kulo nggih mpun tuwo bu, mpun boten waged lek kerjo kalih komputer nopo laptop kados nem-neman (saya sudah tua, sudah tidak bisa bekerja dengan mengoperasikan komputer atau laptop, seperti aparat yang masih muda (Wawancara, 05 Juni 2021).

Hasil temuan Gazalin *et al.*, (2022) bahwa kapasitas kepala desa dan aparatur desa yang masih kurang profesionalismenya dan manajemen sumber daya manusia akan menjadi terkendala dalam pelaksana tehnis pemerintahan desa. Hasil kajian yang berbeda ditemukan oleh Meliyanti (2018) bahwa kapasitas teknis yang rendah, karena aparat kurang memahami jenis pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga kurang memiliki kemampuan berkomunikasi. Dengan demikian kapasitas teknis sangat diperlukan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Hal ini dapat diperoleh melalui proses pemahaman, pelatihan, dan praktik. Liang-Gie (2007) menyatakan bahwa kegiatan menguasai keterampilan dengan tambahan bahwa mempelajari keterampilan harus dibarengi dengan kegiatan praktek, berlatih, dan mengulang-ulang suatu kerja. Dengan demikian maka perangkat pemerintah Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar sudah memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi.

### **Kecakapan Sosial**

Hasil kajian menunjukkan kecakapan sosial yaitu sebesar 85,18% disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Kecakapan Sosial Aparat Desa dalam Administrasi Pemerintahan**

No	Kecakapan diri	Skor			Persentase %
		xi	Σx	Σxi	
1.	Kesadaran diri	4	47	60	78
2	Harga diri (Slef-esteem)	4	56	60	93
3.	Membuat keputusan	4	37	60	61
4	Mengelola waktu	4	55	60	91
5	Resolusi konflik	4	54	60	90
6	Keterampilan komunikasi	4	46	60	77
7	Respek thd perbedaan	4	56	60	93
8	Individu	4	58	60	96
9	Kepemimpinan	4	51	60	85
Jumlah		36	460	540	85,18
Persentase					85,18

$$\text{Persentase} = \frac{\sum x}{\sum xi} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan

- xi : Jumlah skor ideal setiap satu item
- Σx : Jumlah keseluruhan jawaban
- Σxi : Jumlah keseluruhan nilai ideal semua item

Berdasarkan hasil kajian tersebut menunjukkan kecakapan sosial aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa berada pada kategori “baik sekali” respek terhadap perbedaan sangat tinggi mencapai 96%. Hal ini merupakan modal sosial penting dalam menyelenggarakan tugas aparat desa dalam pelayanan publik melalui pelaksanaan administrasi desa, karena dengan respek terhadap perbedaan individu akan mempengaruhi kinerja aparat

desa (Mangkunegara, 2011). Sedangkan yang terendah pada kecakapan membuat keputusan yaitu 61%. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa masih saling menunggu, belum menyadari tugasnya. Hal ini akan berakibat lambatnya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam pelayanan publik.

## **KESIMPULAN**

Sesuai dengan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa “kemampuan aparat desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Desa Blitar, Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar apabila dilihat dari aspek kapasitas intelektual, belum optimal. Hal ini disebabkan karena jenjang pendidikan aparat desa yang masih rendah. Begitu pula dengan aspek kapasitas fisik. Walaupun memiliki stamina yang kuat, dan dukungan sarana prasarana yang cukup memadai namun belum semua aparat desa memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Kecakapan sosial aparat desa sangat baik. Meskipun demikian kecakapan dalam membuat keputusan perlu ditingkatkan, agar pelaksanaan administrasi pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan temuan penelitian ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diajukan untuk mengoptimalkan kapasitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa adalah: (1) untuk pemerintah daerah Kabupaten Blitar, untuk dapat membuat kebijakan peningkatan sumber daya manusia melalui program bantuan pendidikan untuk perangkat desa, serta pelatihan peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi pemerintahan desa, (2) untuk mengoptimalkan kapasitas dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dapat dilakukan oleh kepala desa dengan memberikan kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan, serta memberikan motivasi kepada aparat agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, S. (2013). *Instrumen perangkat pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bogdan, B., & Biklen, B. (1984). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bogor: Buku Ilmiah Populer.
- Denzin, N. K. (2008). *The landscape of qualitative research (Vol. 1)*. Thousand oaks, CA: Sage.
- Dilapanga, A. R., & Zingal, Z. H. (2018). Pembinaan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan administrasi desa di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 82–85. Makasar: Universitas Negeri Makasar. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/7668/4448>
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran pemerintah Desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(3), 291–303.
- Faisal, S. (1989). *Format-format penelitian sosial: Dasar-dasar dan aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gazalin, J., Asiri, L., Mansur, M., Mayunita, S., Kastan, K., Wiranto, R., ... Hanafi, H. (2022). Peningkatan Kemampuan aparat desa dalam tata kelola pelaporan keuangan desa. *Journal of Community Development*, 3(1), 24–32.
- Habibi, M. M., Sukriono, D., Rapita, D. D., & Sudirman, S. (2019). Pendampingan pembentukan standar pelayanan publik pemerintahan desa sebagai upaya mewujudkan good village governance. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 2(1), 19–27.
- Hanno, P. D., Patton, D., & Marlow, S. (2000). Transactional learning relationships: Developing management competencies for effective small firm-stakeholder interactions. *Education and Training*, 42(4), 237–245.
- Hendwardani, B. (2020). Pengaruh pendidikan dan pelatihan perangkat desa terhadap tingkat pelayanan publik di Desa Bonjok Kidul. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 4(2), 234–251.
- Imbaruddin, A. (2007). Ombudsman, meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(3), 23–31.

- Liang-Gie, T. (2007). *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2011). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mattoasi, M., Sapeni, A., & Musue, D. P. (2020). Pengaruh kompetensi aparat desa dan tingkat pendidikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada aparat desa se Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una). *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 3(2), 59–65.
- Meliyanti, I. A. (2018). Kemampuan kerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan administratif di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 121–132. <https://doi.org/10.25157/-dinamika.v5i1.1213>
- Natsir, M. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2017). *Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Robbins, S. P., Judge, T. A., Angelica, D., & Resthi, W. (2008). *Perilaku organisasi: Organizational behavior*. Jakarta: Salemba Empat.
- Spencer, L. M., & Spencer, P. S. M. (2008). *Competence at work models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research techniques*. Thousand oaks, CA: Sage publications.
- Tul, F. P. D. (2020). Kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa (studi kasus di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango). *PROSIDING*, 10(4781), 1–14. Gorontalo: Pusat Penelitian Pengabdian dan Masyarakat (P3M) STIA Bina Taruna Gorontalo.
- Untari, S., & Suharto, Y. (2020). The development of youth and woman entrepreneurship program in village tourism through partnership. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 33(4), 1538–1544.
- Wibowo, W. (2007). *Manajemen kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
- Yin, R. K. (2012). *Case study methods* (H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher, Eds.). American Psychological Association.